

Daftar Pustaka

Buku :

- Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Ed. Revisi. Cet.8. Jakarta. Djambatan.
- Hatta, Moh. (2014). *Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*. Yogyakarta. Liberty.
- Ismaya Simun. (2011). *Pengantar Hukum Agraria*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Parlindungan A.P. (2009). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Peranginangin Effendi. (1986). *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak atas Tanah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Group.
- Philipus M. Hadjon. (1994). *Pengkajian IlmuHukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Yuridika. Nomor 6 Tahun IX.
- Santoso, Urip. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta Kencana.
- Sayekti Sri. (2000). *Hukum Agraria Indonesia*. Malang. Setara Press.
- Soedjendro Kartini. (2005). *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*. Yogyakarta. Kanisius.
- Sutedi Adrian. (2002). *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Jakarta. Cipta Jaya.
- Sutedi Adrian. (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Tehupeiory Aartje. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta.
- Raih Asa Sukses.
- Wibawanti, Erna Sri. (2013). *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Yogyakarta.
- Liberty.Irawan Soerodjo. (2002). *Kepastian Gukum Pendaftaran Hak atas Tanah di Indonesia*. Surabaya. Arloka.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (2000). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum.* Bandung. Penerbit Alumni.

Jurnal :

- Alfi Khairi. (2018). *Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuanatan Singingi Tahun 2017.* Jurnal JOM Fisip. Vol. 5. No. 2.
- Antik Bintari. (2016). *Formulasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta.* Jurnal Ilmu Pemerintahan. ISSN 2442-5958.
- Asep Hidayat, Engkus, Hasna Afra. N. (2018). *Jurnal Pembangunan Sosial. Implementasi Kebijakan Menteri Agraria Dan TataRuang Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandung.* Vol 1. No 1.
- Bambang Sugianto. (2017). *Pendaftaran Tanah Adat untuk Menadapat Kepastian Hukum.* Jurnal Panorama Hukum. Vol.2. No. 2. ISSN. 25-27-6654.
- Benedicta Putri Dumaturun. (2016). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Konversi Hak Milik atas Tanah Adat) dalam Rangka Memberikan Jaminan Kepastian Hukum di Kabupaten Merauke.* 2016.
- Broto Susanto. (2014). *Kepastian Hukum Sertifikat Hak atas Tanah Berdasarkan Perturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.* Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 10. No. 20.
- Dian Aries Mujiburohman. (2018). *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.* Jurnal Bhumi. Vol. 4. No. 1. ISSN 2442-6954. e-ISSN 2503-4952.
- Ilyas Ismail. (2011). *Sertifikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan.* Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 53.
- Indri Hadisiswati. (2014). *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah.* Jurnal Ahkam. Vol.2. No. 1.
- Ismail N. (2012). Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat (*Political directiaon of land law and protection of people's land ownership*). Jurnal RechtsVinding. Vol. 1. No. 1.

Istiqamah. Jurnal Jurisprudetie. (2018). *Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PtSL) Terhadap Kepemilikan Tanah*. Vol. 5. No. 2.

Rahmat Ramadhani. (2017.) *Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung dalam Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jurnal De Lega Lata, Vol. 2, No. 1.

Siti Hardianti Rukmana Manurung. (2017). *Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) di Kota Pekanbaru*. Jurnal JOM FOSIP. Vol.4. No. 2.

Syamsu Alam. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.

Triana Rejekiningsih. (2016). *Asas Fungsi Sosial hak atas tanah pada Negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia)*. Jurnal Yustisia, Vol.2. No. 5.

Veralin Kamurahan Sherley. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang, Brat, Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Trans Disiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Ekonomi dan Hukum. Vol. 14. No. 1.

Perundang-Undangan :

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.